

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK RI berkedudukan di Jakarta dan untuk mempermudah melakukan tugasnya, BPK mempunyai perwakilan di setiap provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat diresmikan pada tanggal 26 Oktober 2007 dengan mencakup wilayah pemeriksaan yaitu 1 pemerintah Provinsi, 7 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dalam Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) BPK Sumatera Barat tahun 2016-2020, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (selanjutnya disingkat menjadi AKN) V dan bertanggung jawab kepada anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V. BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK menyusun suatu Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disingkat LHP) yang memuat rekomendasi atas temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat menjadi OPD) yang berisikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan sistem pengendalian internal dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dengan disusunnya LHP BPK ini, maka OPD diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas adanya temuan tersebut tetapi tidak melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK dengan menyusun suatu rencana aksi (*action plan*). Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga berfungsi sebagai media komunikasi bagi BPK dengan OPD pada setiap daerah dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara.

Laporan yang berkualitas harus memuat informasi yang baik sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik pula. Menurut Sutarman (2012:14), informasi adalah sekumpulan fakta (*data*) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi si pengguna. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Mc. Leod (1997) yaitu akurat, tepat waktu, relevan dan legkap. Sedangkan, definisi komunikasi menurut J.A Devito komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Pengguna informasi yang membaca tulisan yang panjang akan membuat mereka merasa jenuh dan daya ingatan mereka terhadap kata-kata yang mereka baca juga akan menjadi rendah sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan membaca secara berulang-ulang. Sementara,

komunikasi yang efektif merupakan komunikasi tanpa adanya hambatan dan gangguan. Laporan yang berkualitas dapat menguntungkan pengguna karena mereka memerlukan informasi yang tepat agar keputusan yang diambil juga tepat dan berkualitas. Dalam kasus LHP ini, berarti laporan yang disusun oleh BPK harus mempunyai kriteria yang mudah untuk dibaca sebagai upaya untuk menggambarkan suatu laporan yang mudah dipahami.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988:62), keterbacaan itu merupakan perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dimengerti, dipahami, dan mudah pula diingat. Selanjutnya, Cowie (1989:1043) selaku Chief Editor *Oxford Advanced Learner's Dictionary* mengartikan “keterbacaan” ini dengan istilah *readable* dan atau *readability* yang berarti dapat dibaca dengan mudah dan nyaman. Kridalaksana (1994) memaknai keterbacaan sebagai taraf dapat tidaknya suatu karya tulis dibaca oleh orang yang mempunyai kemampuan membaca yang berbeda-beda.

Dengan memperhatikan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan itu mempersoalkan tingkat kesulitan dan atau tingkat kemudahan dibaca suatu bahan bacaan tertentu bagi tingkat pembaca tertentu. Menurut Hafni sebagaimana dikutip oleh Isna (2011: 5), ada 3 jenis metode yang biasa digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana. Ketiga metode tersebut adalah formula, grafik dan carta, serta prosedur klos (*cloze procedure*). Formula keterbacaan meliputi *Reading Ease*, *Human Interest*, *Dale and Chall*, serta *Fog Index*. Jenis grafik meliputi grafik *Fry*, grafik *McLaughlin*, dan grafik *Mugford*. Jenis carta yaitu carta *Rudolf Flesch*. Keterbacaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula (rumus) seperti *The Dale-Chall Formula*, *The Fry Readability Graph*, *Reading Ease Formula*,

Flesch Reading Ease/Plesch-Kincaid Grade Level Tools, SMOG Test, Cloze Test, Length of Document dan *Fog Index*. Semua formula tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengetahui tingkat kesulitan memahami suatu bahan bacaan.

Courtis (1995), mengusulkan bahwa untuk peningkatan keterbacaan, perusahaan perlu menulis laporan dengan kalimat yang singkat, penggunaan kata-kata yang singkat dan sederhana, dan memperhatikan format dalam penulisan informasi untuk meningkatkan minat pembaca. Li (2008), juga berpendapat bahwa menggunakan panjang kalimat sebagai salah satu proksi untuk mengukur keterbacaan laporan keuangan. Hasil penelitian Li menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba rendah memiliki laporan keuangan yang panjang. Lahtinen dan Shipe (2017), juga melakukan penelitian mengenai keterbacaan pengungkapan perusahaan penasihat keuangan, mereka menemukan bahwa perusahaan memiliki pengungkapan yang sulit dibaca sehingga informasi tersebut tidak menguntungkan bagi investor dan yang *uninformed*, dan menyebabkan presentasi klien yang menggunakan jasa penasihat keuangan tersebut menurun.

Pada renstra BPK Sumbar tahun 2016-2020, disebutkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi Provinsi Sumbar perlu ditingkatkan karena pada laporan terakhir tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan pencapaian yang baik karena persentasenya masih berada pada angka 55%. Hal ini dikarenakan dalam penindaklanjutan rekomendasi dari temuan BPK, masih banyak ditemukan kendala yang dialami oleh entitas yang diperiksa oleh BPK. Kendala tersebut yaitu dalam hal pembacaan LHP dan rekomendasi atas temuan yang ada

pada entitas tersebut. Menurut staf Inspektorat yang menjadi sampel dalam penelitian ini, BPK dalam menyusun LHP ini menggunakan bahasa *accounting*, sedangkan tidak semua pengguna LHP BPK tersebut mempunyai *background* akuntansi sehingga mereka kesulitan dalam memahami bahasa yang terdapat dalam LHP. Kesulitan yang mereka alami itu mempengaruhi jangka waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK juga perlu menyusun LHP sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna LHP itu sendiri sehingga menghasilkan suatu laporan yang berkualitas sebagai penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK?
2. Bagaimana pengaruh keterbacaan temuan LHP BPK terhadap komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan oleh pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Menganalisis level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh keterbacaan temuan LHP BPK terhadap komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan oleh pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan sarana pengembangan untuk meneliti tentang hubungan laporan hasil pemeriksaan BPK dengan variabel lainnya yang belum pernah diukur sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan dari multidisiplin ilmu yaitu ilmu akuntansi dan ilmu bahasa.

2. Bagi BPK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi BPK untuk mengungkapkan informasi secara tepat dan tidak sulit untuk dipahami bagi semua pengguna.

3. Bagi Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Penelitian ini bisa menjadi salah satu pendukung dalam pengambilan keputusan bisnis ataupun keputusan lainnya dengan mempertimbangkan sukar atau mudahnya keterbacaan laporan hasil pemeriksaan BPK.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yang tersistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas juga diuraikan dalam bab ini. Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian serta kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas cara pengumpulan data, populasi dan sampling, model penelitian, variabel yang digunakan dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan, hasil pengujian hipotesis serta akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah awal.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan penelitian serta saran yang akan diberikan guna penelitian berikutnya terkait penelitian ini.